



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **LUCHMAN SANJAYA**
2. Jabatan : **CAMAT**
3. NHK : **464313**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.400.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m²/135 m² di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah Seluas 1400 m² di KAB / KOTA SIDOARJO, WARISAN Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 189.300.000**

1. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
2. MOTOR, YAMAHA RX K 135 Tahun 1981, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOTOR, HONDA ASTRA C 90 Tahun 1965, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
4. MOBIL, SUZUKI GRAND VITARA Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
5. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
6. MOTOR, YAMAHA RX K 135 Tahun 1981, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
7. MOTOR, HONDA ASTRA C 90 Tahun 1965, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
8. MOTOR, YAMAHA MATIC XEON Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 2.800.000



9. MOBIL, HONDA CIVIC SO4 GM MT / SEDAN Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	20.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.609.300.000
III. HUTANG	Rp.	120.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.489.300.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.